

TUGAS PANCASILA



Oleh :

Renaldi uca baliki

23208044

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	I
PEMBAHASAN.....	1
1. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA REFORMASI.....	1
RANGKUMAN.....	2
2. GERAKAN REFORMASI.....	2
RANGKUMAN.....	3
3. GERAKAN REFORMASI DALAM IDEOLOGI PANCASILA.....	4
RANGKUMAN.....	5
4. PANCASILA SEBAGAI DASAR CITA-CITA REFORMASI.....	5
RANGKUMAN.....	7
5. PANCASILA SEBAGAI DASAR REPORMASI MASYARAKAT.....	8
RANGKUMAN.....	9

PEMBAHASAN

1. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA REFORMASI

Gelombang gerakan Reformasi di Indonesia terjadi karena beberapa faktor yang terkait dengan praktek elit politik yang korup dan tidak transparan. Salah satu penyebab utama adalah akumulasi kesenjangan sosial-budaya yang mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk "keluar" dari akar budayanya, seperti yang ditegaskan dalam Hal ini dapat berkontribusi pada disintegrasi bangsa dan meningkatkan konflik sosial horizontal di kalangan elit politik.

Selain itu, transformasi sistem sentralistik menjadi desentralistik yang dihasilkan oleh perjuangan reformasi juga mempengaruhi praktek elit politik. Kekuatan modal telah berperan di setiap tahapan proses kontestasi, seperti yang ditemukan dalam. Hal ini dapat mempengaruhi model komunikasi politik dan menciptakan model kepemimpinan transaksional yang dapat berpengaruh pada arah penurunan substansial demokrasi. Korupsi elit partai politik juga menjadi masalah yang signifikan dalam era reformasi. Korupsi ini dapat berupa praktik transaksional yang mempengaruhi model komunikasi politik dan dapat berkontribusi pada penurunan substansial demokrasi.

Korupsi elit partai politik dapat dilakukan untuk membiayai aktivitas politik, baik pribadi maupun untuk kepentingan partai, seperti yang ditegaskan dalam. Dalam etika politik dilihat sebagai penting untuk mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat. Namun, dalam praktek elit politik, etika politik seringkali tidak dijunjung tinggi, dan para penguasa lebih fokus pada kepentingan pribadi dan kekuasaan daripada kepentingan masyarakat. Hal ini dapat berkontribusi pada penurunan substansial demokrasi dan meningkatkan konflik sosial. Dalam sintesis, gelombang gerakan Reformasi di Indonesia terjadi karena akumulasi kesenjangan sosial-budaya, transformasi sistem pemerintahan, korupsi elit partai politik, dan kurangnya etika politik dalam praktek elit politik.

RANGKUMAN

Gerakan reformasi yang melanda Indonesia terkait dengan penyakit KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) merupakan respons terhadap berbagai krisis yang melanda Indonesia, termasuk krisis ekonomi, hukum, politik, keamanan, dan sosial budaya. Tujuannya adalah untuk memperbaiki sistem pemerintahan, menegakkan hukum yang adil, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu tuntutan utama dari gerakan reformasi 1998 adalah pemberantasan KKN yang terjadi di Indonesia, dengan tujuan menciptakan pemerintah yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah melanda Orde Baru. Selain itu, latar belakang lahirnya gerakan reformasi juga terkait dengan krisis ekonomi berkepanjangan dan politik sentralisasi Orde Baru yang mengakibatkan ketimpangan dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Gerakan reformasi ini dipicu oleh tuntutan masyarakat akan perubahan yang lebih baik dan adil dalam tatanan pemerintahan serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan berbagai aksi protes dan tuntutan reformasi, masyarakat Indonesia berupaya untuk memperbaiki sistem yang telah terkooptasi oleh praktik KKN demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

2. GERAKAN REFORMASI

Gerakan reformasi seharusnya menggunakan Pancasila sebagai sumber nilai dasar etik bagi negara dan aparat pelaksana negara. Namun, dalam kenyataannya, Pancasila sering digunakan sebagai alat legitimasi politik. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. ***Politik Kepentingan***: Beberapa pihak mungkin menggunakan Pancasila sebagai alat untuk melegitimasi kebijakan atau tindakan politik mereka, tanpa benar-benar menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

2. *Ketidak Konsistenan Implementasi*: Terkadang terdapat kesenjangan antara retorika yang menekankan pentingnya Pancasila sebagai panduan moral dengan praktik sehari-hari di dalam politik yang mungkin tidak selaras dengan nilai-nilai tersebut.

3. *Kurangnya Pendidikan dan Kesadaran*: Pendidikan dan pemahaman yang kurang mendalam terhadap nilai-nilai Pancasila dapat menyebabkan penggunaannya yang dangkal dan hanya sebatas pencitraan politik.

4. *Polarisasi Politik*: Adanya polarisasi politik dan perbedaan interpretasi terhadap nilai-nilai Pancasila dapat memicu penyalahgunaan Pancasila sebagai alat legitimasi politik.

Penting untuk menjaga integritas nilai-nilai Pancasila dan memastikan implementasinya yang konsisten. Pendidikan dan kesadaran yang lebih baik tentang Pancasila juga diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan Pancasila sebagai alat politik semata.

RANGKUMAN

Gerakan Reformasi Pancasila yang seharusnya berfungsi sebagai sumber nilai dasar etik bagi negara dan aparat pelaksana negara, dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik karena adanya resistensi terhadap Orba yang telah menjadikan Pancasila sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan dan melindungi pemerintahan otoriter. Ketergerusan status Pancasila dalam tatanan hukum nasional juga disebabkan oleh pluralisme hukum yang mengakibatkan keberadaan Pancasila menjadi semakin termarginalkan. Selain itu, Pancasila hanya digunakan sebagai simbolis dalam hukum, menghasilkan disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan seperti adanya UU dan Perda yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila

3. GERAKAN REFORMASI DALAM IDEOLOGI PANCASILA

Gerakan reformasi bisa mengalami salah arti sehingga perubahan yang dilakukan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan awal. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. **Penafsiran yang Berbeda**: Setiap individu atau kelompok dalam gerakan reformasi mungkin memiliki pemahaman yang berbeda tentang tujuan dan maksud dari gerakan tersebut. Perbedaan penafsiran ini bisa menyebabkan perubahan yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya dimaksudkan.

2. **Pengaruh Politik**: Adanya kepentingan politik dalam gerakan reformasi bisa mempengaruhi arah dan tujuan gerakan tersebut. Beberapa pihak bisa menggunakan gerakan reformasi sebagai alat untuk mencapai tujuan politik mereka sendiri, yang mungkin tidak sesuai dengan tujuan asli gerakan reformasi.

3. **Kehadiran Pihak-Pihak Eksternal**: Dalam gerakan reformasi, terkadang ada pihak eksternal yang ikut terlibat dan mempengaruhi jalannya gerakan. Pengaruh dari pihak eksternal ini bisa menyebabkan perubahan yang tidak sesuai dengan tujuan awal gerakan reformasi.

4. **Kurangnya Koordinasi dan Komunikasi**: Kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif antara anggota gerakan reformasi bisa menyebabkan perubahan yang tidak sejalan dengan tujuan gerakan. Tanpa koordinasi yang baik, setiap individu atau kelompok dalam gerakan reformasi bisa melakukan perubahan sesuai dengan pemahaman dan kepentingan masing-masing.

Penting untuk menjaga komunikasi dan koordinasi yang baik dalam gerakan reformasi agar perubahan yang dilakukan tetap sesuai dengan maksud dan tujuan awal gerakan. Selain itu, pendidikan dan pemahaman yang lebih baik tentang tujuan dan nilai-nilai gerakan reformasi juga penting untuk mencegah salah arti dan perubahan yang tidak sesuai.

RANGKUMAN

Penyalahartian terhadap gerakan reformasi dapat menyebabkan perubahan yang menjauh dari maksud dan tujuan aslinya. Reformasi adalah upaya untuk melakukan perbaikan atau perubahan positif dalam sistem politik, sosial, ekonomi, atau budaya. Namun, penyalahartian bisa terjadi ketika pihak-pihak tertentu menggunakan narasi reformasi untuk kepentingan mereka sendiri, seringkali dengan cara yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan kesejahteraan masyarakat.

Misalnya, dalam konteks politik, penyalahartian reformasi bisa terjadi ketika pemerintah atau kelompok politik tertentu menggunakan isu reformasi untuk memperkuat kekuasaan mereka tanpa memperhatikan kebutuhan atau aspirasi rakyat. Mereka mungkin menekan oposisi, membatasi kebebasan berpendapat, atau melanggar hak asasi manusia, yang sebenarnya bertentangan dengan nilai-nilai reformasi yang sejati.

Di bidang ekonomi, penyalahartian reformasi bisa terjadi ketika kebijakan-kebijakan yang diambil dalam nama reformasi justru menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi semakin memburuk. Misalnya, privatisasi yang tidak tepat atau deregulasi yang tidak terkendali bisa menguntungkan segelintir orang sementara merugikan mayoritas rakyat.

Untuk menghindari penyalahartian gerakan reformasi, penting bagi masyarakat untuk tetap kritis terhadap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau pihak-pihak yang berkuasa. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang luas adalah kunci dalam memastikan bahwa reformasi dilakukan sesuai dengan semangat aslinya untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi semua.

4. PANCASILA SEBAGAI DASAR CITA-CITA REFORMASI

Praktek nepotisme yang disalahgunakan menjadi kolusi dan korupsi dapat terjadi ketika nilai-nilai Pancasila yang seharusnya menjadi dasar cita-cita reformasi diabaikan atau disalahgunakan. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan hal ini adalah:

1. **Kelemahan Sistem**: Sistem pemerintahan yang lemah dan tidak transparan dapat mempermudah terjadinya praktek nepotisme, kolusi, dan korupsi. Kurangnya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dapat memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

2. **Ketidakpatuhan terhadap Nilai-Nilai Pancasila**: Ketika para pelaku di dalam pemerintahan tidak menghormati dan tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka praktek korupsi dan nepotisme dapat berkembang. Penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu bertentangan dengan prinsip keadilan dan persatuan yang terkandung dalam Pancasila.

3. **Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan**: Kurangnya kesadaran akan pentingnya integritas dan kejujuran dalam menjalankan pemerintahan serta kurangnya pendidikan yang menyentuh nilai-nilai Pancasila dapat menjadi faktor penyebab praktek nepotisme dan korupsi. Kesadaran yang tinggi akan nilai-nilai moral dan etika serta pemahaman yang mendalam tentang Pancasila dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya upaya yang komprehensif, antara lain:

1. **Penguatan Sistem Pengawasan**: Meningkatkan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif dapat mencegah terjadinya praktek nepotisme, kolusi, dan korupsi. Penguatan lembaga-lembaga pengawas dan penegak hukum yang independen serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara sangat penting.

2. **Pendidikan dan Kesadaran**: Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila serta bahaya praktek nepotisme dan korupsi dapat membantu mengubah paradigma dan perilaku yang tidak etis. Pendidikan anti-korupsi sejak dini dan kampanye kesadaran publik tentang pentingnya integritas dan kejujuran dapat membentuk generasi yang lebih bertanggung jawab.

3. *Komitmen Pemimpin*: Pemimpin yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap prinsip-prinsip Pancasila dan berintegritas dapat memberikan contoh yang baik bagi masyarakat dan menginspirasi para penyelenggara negara untuk menjalankan tugas mereka dengan baik.

Penting untuk menjaga integritas dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kita dapat mencegah praktek nepotisme, kolusi, dan korupsi serta mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, dan berkeadilan.

RANGKUMAN

Penyalahgunaan dasar cita-cita reformasi yang terkandung dalam nilai Pancasila menjadi praktek nepotisme dan kolusi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat dan tujuan reformasi itu sendiri. Reformasi, yang muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu, seharusnya didorong oleh nilai-nilai Pancasila yang mengutamakan keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan.

Namun, dalam praktiknya, pemimpin atau pihak yang berkuasa seringkali memanfaatkan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok, melanggar nilai-nilai Pancasila yang seharusnya menjadi landasan negara. Nepotisme, atau memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga atau teman dekat dalam pemberian jabatan atau keuntungan, dan kolusi, atau persekongkolan untuk mencapai keuntungan pribadi melalui tindakan-tindakan ilegal atau tidak etis, menjadi praktek yang merajalela.

Hal ini menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan peluang, merugikan masyarakat secara luas, serta merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi negara. Penyalahgunaan ini juga dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dan ketidakstabilan politik yang berkepanjangan.

Untuk melawan penyalahgunaan ini, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga negara, untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila dijunjung tinggi dan diterapkan secara konsisten dalam semua aspek kehidupan negara. Ini termasuk memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mempromosikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan keputusan publik.

5. PANCASILA SEBAGAI DASAR REFORMASI MASYARAKAT

Reformasi adalah tuntutan rakyat untuk melakukan pembaharuan dalam sistem hukum sebagai aturan perundang-undangan. Tujuan dari reformasi adalah untuk memperbaiki dan mengubah kebijakan hukum yang dianggap tidak adil, korup, otoriter, atau tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Peristiwa reformasi hukum terjadi pada tanggal 21 Mei 1998 di Indonesia. Peristiwa ini diawali oleh demonstrasi mahasiswa yang menuntut reformasi politik dan ekonomi, namun kemudian berkembang menjadi gerakan yang lebih luas meliputi reformasi hukum, reformasi kepolisian, dan reformasi institusi lainnya. Pada tanggal 21 Mei 1998, demonstrasi besar-besaran terjadi di Jakarta dan berbagai kota di Indonesia. Demonstrasi ini mencapai puncaknya dengan kerusuhan di beberapa tempat. Peristiwa ini menjadi titik balik dalam sejarah Indonesia karena berhasil menggulingkan rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama lebih dari 30 tahun.

Sebagai hasil dari peristiwa reformasi, beberapa perubahan signifikan terjadi dalam sistem hukum Indonesia. Beberapa undang-undang yang dianggap kontroversial atau otoriter dicabut atau diubah, dan beberapa peraturan baru diperkenalkan untuk memperkuat demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan sipil.

Peristiwa reformasi hukum pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi tonggak penting dalam sejarah Indonesia dan merupakan momen yang bersejarah dalam upaya memperbaiki sistem hukum dan pemerintahan negara.

RANGKUMAN

Reformasi sebagai tuntutan rakyat terhadap pembaharuan hukum sebagai aturan perundang-undangan dan peristiwa reformasi hukum terjadi pada tanggal 21 Mei 1998. Peristiwa ini berupa aksi mahasiswa yang menuntut adanya reformasi dan perubahan pada sistem hukum Indonesia, yang pada saat itu dianggap tidak demokratis dan korup. Aksi ini berlangsung pada bulan Mei 1998 dan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi jatuhnya Presiden Soeharto dan berakhirnya Orde Baru, yang dikenal dengan kekuasaan yang sangat sentralistik dan korup.